

STRATEGI PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA 1 GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN PERAIRAN NASIONAL DALAM RANGKA Mendukung Operasi Militer Selain Perang

Oleh:

Wijayanto¹⁾, Marsono²⁾, Haposan Simatupang³⁾

^{1,2,3}Program Studi Strategi dan Kampanye Militer, Universitas Pertahanan
¹wijay4296@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya permasalahan dan implikasi dari stabilitas keamanan perairan Indonesia saat ini dimana hal tersebut dipengaruhi berbagai Isu-isu kejahatan yang bersifat lintas Negara, dikorelasikan dengan Penyelenggaraan pengamanan di wilayah ALKI 1 permasalahan yang muncul pertama adalah regulasi, dimana belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan operasi pengamanan ALKI. kedua dari sisi sarana prasarana seperti radar dan alat komunikasi lintas sektoral yang belum dilengkapi dengan radar deteksi maupun alat komunikasi yang terintegrasi, dan mengacu pada hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang. Menganalisis Bentuk Operasi Militer Selain Perang di wilayah ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang dan Upaya dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data di dapat dari wawancara, pengamatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pengamanan ALKI 1 dilakukan dengan melaksanakan interoperabilitas lintas sektoral baik TNI dengan instansi lainnya, bentuk Operasi dilaksanakan dengan operasi gabungan terpadu upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1, dimana beberapa hal tersebut masih terkendala beberapa persoalan seperti SDM, maupun sarpras, mengacu pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi penyelenggaraan ALKI 1 perlu diawaki SDM yang berkualitas khususnya mumpuni dalam bidang teknologi, dengan memiliki kemampuan dan kualitas memadai dalam melaksanakan penyelenggaraan pengamanan di wilayah ALKI 1.

Kata kunci: Strategi Pengamanan ALKI 1, Pengamanan ALKI 1, Operasi Militer Selain Perang.

1. PENDAHULUAN.

Operasi Militer Selain Perang merupakan pola operasi yang dilaksanakan TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang dalam melaksanakan tugasnya salah satunya adalah dilakukan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas-tugas nontempur dan tempur, seperti tugas-tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana serta untuk kepentingan nasional, termasuk Pengamanan Pelayaran dan Penerbangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau dan terdapat 92 pulau terluar, dimana 67 pulau terluar ini berbatasan langsung dengan Negara tetangga sebagai pulau-pulau kecil perbatasan.

Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) selain dapat memberikan implikasi dampak positif bagi kegiatan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat, juga dapat berimplikasi menimbulkan potensi ancaman terhadap kepentingan

nasional Indonesia. Kondisi geografi Indonesia memiliki posisi terbuka yang setiap saat dapat menjadi peluang bagi negara lain untuk masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Potensi Ancaman di ALKI tentu akan berdampak kepada lingkungan perairan dan pulau sekitarnya, begitu pula sebaliknya

Seperti yang terjadi di wilayah ALKI 1, Potensi ancaman di ALKI 1 terkait imbas konflik klaim wilayah atas kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan, seperti digunakannya wilayah ALKI 1 untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat. Di samping itu, imbas kepadatan lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, seperti digunakannya wilayah ALKI 1 oleh perompak untuk menghindari kejaran aparat keamanan Indonesia dan aparat keamanan gabungan (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) atau penyelundupan. Imbas dari pusat pertumbuhan dan perekonomian Asia dan Asia Tenggara di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Singapura, seperti penyelundupan barang-barang ilegal dan juga perdagangan manusia, turut menjadi potensi ancaman di ALKI 1.

Dikorelasikan dengan Penyelenggaraan pengamanan di wilayah ALKI 1 masih ditemukan permasalahan yang muncul, permasalahan pertama adalah regulasi, dimana belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan operasi pengamanan ALKI antara TNI dengan *stakeholder* di bidang pengamanan ALKI seperti dengan TNI AU, Ditpolairud (Polri) maupun dengan Bakamla, dimana masing-masing lembaga memiliki regulasi sendiri dan berdampak pada pelaksanaan operasi yang terkadang memiliki kesamaan waktu sehingga berdampak pada ketidak efektifan penyelenggaraan operasi.

Kemudian dari sisi Sarana prasarana seperti radar dan alat komunikasi lintas sektoral yang belum dilengkapi dengan radar deteksi maupun alat komunikasi yang terintegrasi menyebabkan terjadinya miskomunikasi maupun miskoordinasi dengan pihak yang sedang melaksanakan operasi/patrol di mana hal tersebut merupakan imbas dari terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pengamanan ALKI. Salah satu contoh nyata nya adalah yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2021 Bakamla telah mendeteksi dan menangkap kapal MT.Horse dan MT.Frea di ALKI 1 diduga melaksanakan pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang penelitian, yang menjadi rumusan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Strategi penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang? Bagaimana bentuk Operasi Militer Selain Perang di wilayah ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang dan Bagaimana upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang?

Referensi dan teori yang peneliti gunakan dalam menjawab dan menganalisa rumusan masalah menggunakan konsep dan teori Strategi, sebagaimana menurut Hart (2001) yang menyatakan bahwa strategi sebagai suatu kalkulasi yang matang terkait dengan tujuan, konsep, dan alat dalam ukuran tertentu dengan memperhatikan resiko yang ada sehingga dapat mencapai tujuan. Strategi juga merupakan suatu seni untuk mengembangkan kekuatan nasional dan mengintegrasikannya dengan lingkungan strategis untuk mencapai tujuan nasional. Konsep tersebut akan menyediakan pedoman bagi negara dalam memaksimalkan kepentingan nasional sekaligus meminimalisir ancaman.

Keberadaan strategi sangat penting untuk memberikan pedoman langkah di dalam perkembangan situasi yang tidak menentu. Strategi berasumsi bahwa masa depan tidak dapat diprediksi namun lingkungan strategis dapat dipelajari dan diakses sehingga mampu merumuskan langkah

antisipasi. Yarger (2006) menambahkan jika strategi dilaksanakan dengan mengaplikasikan *ends, ways, dan means* dalam lingkungan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya untuk mempertajam analisis, teori pendukung yang digunakan adalah dengan menggunakan *Teori Naval Diplomacy*, dimana Menurut Booth (2014) yang menyebutkan bahwa *naval diplomacy* dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruh suatu negara dalam pemilihan opsi penawaran kerja sama. Diplomasi jenis ini bahkan dapat digunakan dengan memperlihatkan kekuatan tersebut sebagai unsur pendukung, atau kekuatan yang mewakili tugas tertentu yang diberikan negara terhadap angkatan laut tersebut (Booth 2014). Menurut Booth (2014) Angkatan Laut di seluruh dunia secara universal memiliki 3 (tiga) peran yang dikenal dengan "Trinitas peran angkatan laut" yang terdiri dari Peran Militer (*military*), Peran Polisi (*Constabulary*) dan Peran Diplomasi (*Diplomacy*).

Menurut Booth (2014), *Naval diplomacy* pada hakekatnya hanya berlaku jika kekuatan yang digunakan dalam operasi tersebut relevan, dalam artian benar-benar memberikan pengaruh terhadap prestige yang ingin dicapai. Identifikasi terhadap kuantitas dan kualitas yang menentukan kepantasan dari kekuatan Satgas Maritim TNI sebagai *naval diplomacy* penting dilakukan mengingat dampak dari naval diplomacy dapat memberikan makna yang berbeda-beda

Dan sebagai pendukung teori yang sudah diuraikan sebelumnya, sebagai teori pendukung penulis menggunakan Teori keamanan maritim, Sebagaimana Menurut McNicholas (2008), keamanan maritim adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemilik, operator, administrator kapal, fasilitas pelabuhan, instalasi lepas pantai, serta organisasi kelautan untuk melindungi wilayah laut dari pembajakan, sabotase, penyitaan, pencurian, dan gangguan lainnya dimana Mayoritas ancaman yang terjadi dalam ruang lingkup keamanan maritim merupakan ancaman non-tradisional seperti terorisme maritim, separatisme, radikalisme yang berujung pada konflik komunal dengan laut sebagai medianya, kerusuhan sosial antarpengguna laut, perompakan dan pembajakan di laut, imigran ilegal, penangkapan dan pembalakan ilegal, serta penyelundupan dan pencemaran laut.

Kemudian menurut Siebels (2020) yang menyebutkan bahwa Keamanan maritim adalah istilah umum yang diinformasikan untuk mengklasifikasikan isu-isu dalam domain maritime yang sering dikaitkan dengan keamanan Nasional, lingkungan laut, pembangunan ekonomi, dan keamanan manusia Ini termasuk lautan dunia tetapi juga laut regional, perairan territorial, Sungai dan pelabuhan. istilah keamanan maritim bervariasi dan sementara tidak ada definisi yang disepakati secara internasional, istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan tantangan regional

dan internasional baru yang ada, dan tantangan regional terhadap domain maritim.

Selain itu, teori pendukung lainnya yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu Teori Penyelenggaraan, sebagaimana yang disebutkan oleh Hasibuan (2011) yang menyebutkan Penyelenggaraan merupakan sebuah proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan yang didalamnya terdapat berbagai macam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dan juga dalam penyelenggaraan juga menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas dan juga menyediakan alat-alat yang diperlukan dalam menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Kemudian ditinjau dari bentuk penyelenggaraan, sebagaimana yang disebutkan oleh Handoko (2003) yang mengklasifikasikan beberapa definisi yaitu pertama penyelenggaraan adalah menyusun kembali kerangka tujuan organisasi dengan menetapkan visi dan misi sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi, kemudian pada tahap kedua adalah menata ulang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan peneliti menggunakan penelitian kualitatif penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah (Moleong, 2012)

Pendekatan kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (sugiyono, 2015).

Dari latar belakang penelitian penulis berasumsi bahwa penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode dalam pelaksanaan penelitian hal ini dikarenakan Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Miles, 1992) andasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Strategi penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang.

Dalam konteks Strategi penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 berdasarkan hasil penelitian dan data yang didapatkan, dapat diinterpretasikan bahwa dengan belum terpadunya penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 berdampak pada sulitnya mewujudkan kesatuan komando (*unity of command*) dalam penyelenggaraan pengamanan ALKI 1. Dampaknya terhadap hasil operasi sehingga mengacu pada uraian tersebut, dapat di asumsikan bahwa agar strategi Penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 tercapai maka diperlukan kesiapan Alutsista TNI dan unsur instansi pemerintah yang Optimal Untuk Penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1. Penyelenggaraan pengamanan ALKI yang dilaksanakan oleh TNI (Kogasgabpadpam ALKI 1) menggunakan kekuatan dan kemampuan alutsista yang dimiliki TNI AL, TNI AU dan unsur instansi pemerintah.

Sehingga dengan Unsur KRI dan Pesud yang mampu melaksanakan penindakan secara cepat terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ALKI, karena dengan teknologi tinggi dapat melakukan deteksi, pengintaian jarak jauh disertai dengan sistem persenjataan yang mutakhir, penindakan secara cepat dan akurat terhadap kapal maupun pesawat asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ALKI 1 dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di perairan Indonesia guna mendukung Operasi Militer selain Perang.

Bentuk Operasi Militer Selain Perang di wilayah ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang.

Dalam konteks Bentuk Operasi Militer Selain Perang di wilayah ALKI 1 berdasarkan hasil penelitian dan data yang didapatkan, dapat diinterpretasikan bahwa bentuk OMSP di wilayah ALKI 1 masih bersifat terpusat, dan pihak yang terlibat belum didukung oleh regulasi yang mendukung interoperabilitas antar instansi, dengan Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang melandasi operasi penyelenggaraan pengamanan ALKI khususnya ALKI 1.

Saat ini Indonesia sudah memiliki Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang dengan hak lintas transit, hak lintas damai serta hak lintas akses dan komunikasi bagi kapal asing. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang ALKI. Pada peraturan ini terdapat beberapa pasal tentang pelayaran yang mengatur perlindungan lingkungan maritim dan lintas alur laut kepulauan. Dalam hal ini regulasi

pada ALKI masih membahas aturan-aturan bagaimana ALKI dan tatacara melintasinya sedangkan aturan penyelenggaraan pengamanan ALKI antara TNI dan instansi/stakeholder pemerintah lainnya belum terpadu.

Upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan dalam penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang.

Dalam konteks Upaya dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 terhambat oleh Belum terdukungnya sarana prasana TNI pada penyelenggaraan pengamanan ALKI 1. salah satunya interoperability antar satuan akibat adanya perbedaan peralatan komunikasi dan system enkripsi. Kesiapan operasional alutsista dan Interoperabilitas antara TNI AL dengan TNI AU masih terbatas dalam penyelenggaraan pengamanan ALKI 1.

Sementara untuk kekuatan laut juga terdapat keterbatasan dalam jumlah unsur KRI dan Pesud dibandingkan dengan luas wilayah yang harus diamankan tidak seimbang, sehingga hasil yang dicapai masih kurang maksimal dan juga kondisi teknis terkait dengan teknologi merupakan kendala dalam pelaksanaan operasi.

Sehingga mengacu pada uraian tersebut, dapat di asumsikan bahwa perlu Terealisasi regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang melandasi operasi pengamanan ALKI. Pelaksanaan penyelenggaraan pengamanan ALKI berjalan lancar dan saling bersinergi antara instansi yang terkait, karena sudah pemahaman yang sama sesuai dengan PP yang ada.

Penegakkan hukum dapat dilaksanakan dengan tegas dan terarah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam penyelenggaraan pengamanan ALKI 1. Dengan adanya regulasi yang melandasi penyelenggaraan pengamanan ALKI khususnya ALKI 1 akan lebih optimal dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia guna mendukung Operasi Militer selain Perang.

implementasi dalam upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang maka kekuatan dari unsur-unsur TNI AL yang dibantu dengan kekuatan TNI AU serta kekuatan laut dalam wadah Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang terdiri dari: unsur POLRI, Bea Cukai, KPLP dan Perhubungan Laut yang tergabung dalam satuan pengamanan ALKI. Pengamatan dan pendeteksian dapat dilaksanakan secara visual, elektronik dan akustik

4. KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PEMBATAAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator Strategi penyelenggaraan pengamanan ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas

keamanan perairan Indonesia dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang dapat disimpulkan bahwa dalam aspek *ends* dengan tujuan mendapatkan hasil operasi yang efektif dan efisien, maka diperlukan adanya koordinasi yang lebih sinergis diantara komponen-komponen yang terlibat dalam operasi pengamanan ALKI yaitu Koarmada I Koopsau I, Koopsau II, Kohanudnas dan unsur yang tergabung dalam wadah Bakamla. Sedangkan dalam aspek *Ways* sebagai upaya dalam Meningkatkan Pola Operasi Penyelenggaraan Pengamanan ALKI. Diperlukan peningkatan dan revisi pola operasi disesuaikan dengan analisa intelijen maritim dan analisa intelijen udara dihadapkan pada terbatasnya jumlah unsur laut dan unsur udara yang dapat digelar sesuai dengan Rencana Operasi Pengamanan ALKI. kehadiran unsur penyelenggaraan Pengamanan ALKI (unsur TNI AL, TNI AU dan unsur yang tergabung dalam wadah Bakamla). Untuk dapat mengefektikan dan mengoptimalkan hasil pengamanan ALKI dihadapkan pada ancaman dari berbagai bentuk pelanggaran, diperlukan perhitungan jumlah kebutuhan ideal KRI dan Pesawat Udara di tiga jalur ALKI agar dapat melaksanakan penyebaran, pengamatan, patroli dan penindakan sebagai Sedangkan *Means* dalam konteks ini dapat dilakukan dengan Kekuatan Hankam Negara di Laut yang dapat diproyeksikan antara lain meliputi Armada Pemerintah, Satuan udara maritim, Armada Niaga, Armada Survei dan pemetaan, dan Armada perikanan..

2. Berdasarkan indikator bentuk Operasi Militer Selain Perang di wilayah ALKI 1 guna mewujudkan stabilitas keamanan perairan Indonesia dapat disimpulkan bahwa Operasi pengamanan ALKI sebagai tugas TNI bidang OMSP dalam mendukung penyelenggaraan tugas keamanan maritim harus dipertegas dengan Peraturan Pemerintah sebagai konsekuensi dari UU no 67 tahun 2002 tentang ALKI, agar penyelenggaraannya memiliki regulasi yang kuat. TNI melaksanakan tugas menyelenggarakan operasi gabungan terpadu pengamanan ALKI dalam rangka OMSP karena diatur dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan karena kemauan atau kehendak TNI sendiri. Dengan semakin kuatnya struktur payung hukum di bidang keamanan, lebih khusus lagi sektor pengamanan ALKI, maka sangat berpengaruh langsung terhadap optimalnya penyelenggaraan Operasi gabungan terpadu pengamanan ALKI yang dilaksanakan oleh TNI (Kogasgabpadpam ALKI) dengan instansi Pemerintah. Koordinasi lintas aparat dalam menentukan aparat yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum, untuk menghindari tumpang tindih dalam proses penegakan hukum. Sehingga pada dasarnya,

- terdukungnya Regulasi yang dapat membangun sinergitas lintas sektoral.
3. Berdasarkan indikator Upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1 dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang maka kekuatan dari unsur-unsur TNI AL yang dibantu dengan kekuatan TNI AU serta kekuatan laut dalam wadah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang terdiri dari : unsur POLRI, Bea Cukai, KPLP dan Perhubungan Laut yang tergabung dalam satuan pengamanan ALKI. Pengamatan dan pendeteksian dapat dilaksanakan secara visual, elektronik dan akustik. Kemampuan Dukungan Pengamanan ALKI. Koarmada I selaku Kogasgabpam ALKI 1 dapat memanfaatkan kekuatan yang ada dan menggelarnya dalam rangka pengamanan ALKI dengan menghadirkan unsur-unsur di daerah operasi dengan efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan dampak penangkalan dan penindakan, hal ini harus mendapat dukungan dari Dukungan Intelijen Maritim, Kemampuan K4IPP. (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Informasi, Pengamatan dan pengintaian) dan Pelaksanaan Komunikasi penyelenggaraan Pengamanan ALKI 1.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Booth, K. (2014). *Navies and Foreign Policy*. London: Routledge Publisher.
- Hart, L. H. (2001). *Strategy (2nd Edition)*. New York, NY: Frederick Praeger Publisher
- Hasibuan, Malayu S.P, (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Hoyt, T.T. (2003) *beyond leadership” (12 konsep kepemimpinan)*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Mahan, A. T. (2003) *The Influence of Sea Power Upon History (2nd Edition)*. New York: Little, Brown and Co.
- Miles, B. & Huberman, M. (2004). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Siagian, Y. M. (2005). *Aplikasi Supply Chain Management Dalam Dunia Bisnis*. Jakarta : Grasindo Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Yarger, H. R. (2006). *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. New York: Blackswell Publisher